

Judul : Ongkos Haji Turun Lagi Jadi Rp 54,19 Juta
Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Ongkos Haji Turun Lagi Jadi Rp 54,19 Juta

Ongkos haji 2026 ditetapkan Rp 54,19 juta per anggota jemaah, turun Rp 1,23 juta dari tahun lalu. Penurunan ini melanjutkan tren efisiensi biaya tanpa mengurangi standar layanan.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi rata-rata Rp 87,4 juta per anggota jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan yang ditanggung langsung anggota jemaah ditetapkan Rp 54,19 juta, turun Rp 1,23 juta dibandingkan dengan tahun lalu.

"Biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang ditanggung langsung rata-rata per jemaah sebesar Rp 54,19 juta atau 62 persen dari keseluruhan BPIH. Biaya ini dialokasikan untuk penerbangan, sebagian

akomodasi di Mekkah dan Madinah, serta biaya hidup," ujar Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Marwan menjelaskan, angka itu merupakan hasil pembahasan panjang antara DPR, Kementerian Haji dan Umrah, serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan awal pemerintah dibahas pada Senin (27/10), lalu disepakati dua hari kemudian.

Semula, pemerintah mengusulkan besaran BPIH Rp 88,4 juta per anggota jemaah. Dari

>> BACA JUGA:

Menakar Ongkos Haji 2026: Lebih Murah, tetapi Tak Lebih Ringan

Sejumlah langkah dilakukan untuk terus menekan biaya haji. **KOMPAS.ID**

kompas.as/ongkoshaji

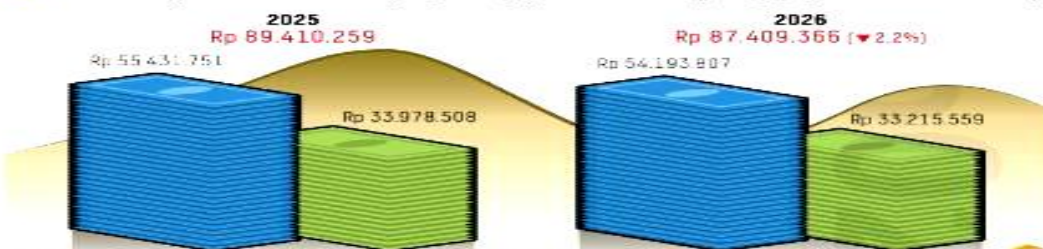
total biaya itu, bipih yang dibayar langsung oleh jemaah dipatok Rp 54,92 juta (62 persen), sedangkan Rp 33,48 juta

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

■ Biaya perjalanan ibadah haji (bipih)

■ Nilai manfaat (imbal hasil dari hasil pengelolaan/optimalisasi keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH)



Sumber: Kementerian Haji dan Umrah, pemberitaan Kompas, Elakoh Litbang Kompas/W/N

Ongkos Haji Turun Lagi

[Sambungan dari halaman 1]

(38 persen) ditanggung menggunakan dana nilai manfaat hasil pengelolaan BPKH.

Namun, setelah pembahasan mendalam, BPIH 2026 disepakati Rp 87,4 juta. Dari jumlah tersebut, 62 persen atau Rp 54,19 juta dibayarkan langsung oleh jemaah, sedangkan 38 persen atau Rp 33,21 juta berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

"Setelah dibahas panjang di Komisi VIII DPR, akhirnya menjadi Rp 87,4 juta dari berbagai hal yang kita telusuri yang dapat lebih dimungkinkan untuk turun," kata Marwan.

Dengan kesepakatan tersebut, BPIH tahun 2026 turun Rp 2 juta dibandingkan dengan 2025 yang sebesar Rp 89,41 juta per anggota jemaah. Adapun BPIH yang dibayar langsung oleh jemaah juga turun Rp 1,23 juta, dari Rp 55,43 juta pada 2025 menjadi Rp 54,19 juta pada 2026.

Penurunan ongkos haji kali ini menjadi yang kedua berturut-turut sejak 2025. Sebelumnya, ongkos yang dibayarkan jemaah haji 2025 juga turun Rp 600.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan ongkos berlanjut pada haji 2026 yang turun hingga Rp 1,23 juta per anggota jemaah. Padahal, pada haji 2016 hingga 2024, ongkos haji selalu naik setiap tahun.

Adapun total nilai manfaat yang digunakan untuk pembiayaan haji 2026 mencapai Rp 6,69 triliun, turun Rp 136,06 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang riyal Saudi dengan kurs acuan 1 dollar AS senilai Rp 16.500 dan 1 riyal senilai Rp 4.400.

Selain menetapkan biaya, rapat juga menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 anggota jemaah, sebagaimana tercantum di Nisak Mashaar Kementerian Haji Arab Saudi. Dari jumlah itu, 203.320 anggota jemaah (92 persen) dialokasikan untuk haji reguler dan 17.680 anggota jemaah (8 persen) untuk haji khusus. Kuota reguler mencakup 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah, 1.050 petugas haji daerah, serta 201.585 jemaah reguler murni.

"Komposisi ini menjadikan jemaah haji Indonesia daftar tunggu seluruhnya sama menjadi 26 tahun," ujar Marwan.

Ia melanjutkan, penurunan ongkos haji tidak akan mengorbankan kualitas layanan. Dalam raker disepakati, lama masa tinggal jemaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari. Jemaah mendapat makan 27 kali di Madinah, 84 kali di Mekkah, dan 15 kali di Arafah, Muzdalifah, serta Mina. Menu bercita rasa Nusantara dengan bahan baku dan juru masak asal Indonesia.

Akademisi di Mekkah di spotek paling jauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah maksimal 1 kilometer dari Masjid Nabawi. Pesawat yang digunakan wajib berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar keamanan internasional. Layanan tenda di Mina ditegaskan harus nyaman dan profesional, serta tidak ada jemaah yang ditempatkan di kawasan Mina Jadid. Setiap anggota jemaah juga akan menerima biaya hidup 750 riyal Arab Saudi atau setara Rp 3,3 juta.

"Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa pelayanan tetap terbaik bagi jemaah. Baik pemondokan, konsumsi, maupun transportasi, semua dikunci dengan kualitas terbaik," ucap Marwan.

Komitmen Prabowo

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, kebijakan penurunan ongkos haji merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut akhirnya disambut baik oleh DPR yang sejalan ingin membuat ongkos haji lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kementerian Haji dan Umrah juga mengapresiasi Panja BPIH dan seluruh anggota Komisi VIII DPR yang rela meninggalkan masa reses demi fokus membahas biaya haji 2026. Tindakan itu merupakan bentuk pengorbanan dan dedikasi demi mewujudkan harapan Presiden Prabowo dan umat Islam di Indonesia.

Menurut Dahnil, seharusnya biaya haji 2026 naik sekitar Rp 2,7 juta per anggota jemaah akibat kenaikan kurs dollar AS. Namun, pemerintah dan DPR menekan pos-pos yang tidak efisien sehingga BPIH justru turun sekitar Rp 2 juta dan ongkos yang dibayar jemaah lebih rendah.

Anggota Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid, menilai penurunan ini positif, tetapi berharap ke depan pengurangan biaya lebih banyak menyentuh porsi yang dibayar langsung jemaah agar beban semakin ringan. Ia menilai efisiensi masih terbuka, antara lain melalui sistem *multi-use* penyewaan hotel dan transportasi serta kemungkinan memperpendek masa tinggal jemaah. Ia berharap praktik baik tahun sebelumnya dipertahankan dan kekurangan tidak terulang. (SYA)